



UNIVERSITY OF OXFORD
INSTITUTE OF HUMAN SCIENCES
THE PAULING CENTRE, 58a Banbury Road, Oxford, OX2 6QS
Telephone: +44 (0)1865 274702 Fax: +44 (0)1865 274699
Email: sarah-jane.white@ihs.ox.ac.uk website: www.ihs.ox.ac.uk

Research Grants
Research, Publication and Community Development Board
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

11.09.19

**Islam and Social-Entrepreneurship:
An Assessment of the Community-Based Development
in Remote Areas in Indonesia**

Dear Sirs,

This letter is to confirm my collaboration in the above project and the research under its research principle, Dr Hilman Latief. This is very important and timely research which follows effectively from Dr Latief's, and from my own, research into civil society and empowerment in Indonesia, and more particularly on the key role of community level approaches and local philanthropy.

I am delighted that Dr Latief has taken this initiative, and will host the research team here at Oxford University for consultation purposes during the analysis and writing up of the research. I look forward to the opportunity to make a suitable contribution to the research during their visit.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philip Kreager".

Philip Kreager D. Phil
Senior Research Fellow in Human Sciences
Somerville College
and
Convenor, Project Southeast Asia
University of Oxford

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN SKEMA PENELITIAN PENUGASAN STRATEGIS



**ISLAM AND ENTREPRENEURSHIP: AN ASSESSMENT OF THE
COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT IN REMOTE AREAS IN
INDONESIA (THE CASE OF KAMPUNG ZAKAT OF THE MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS)**

Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D. (0512097501)

Abd. Madjid, Dr., M.Ag. (0504036101)

Praba Jangkar Kusuma (20160730110)

Dr. Philip Kreager

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Dibiayai Oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Anggaran 2019/2020



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Kampus terpadu: Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55183

Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Informasi Data Usulan Penelitian

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

ISLAM AND ENTREPRENEURSHIP: AN ASSESSMENT OF THE COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT IN REMOTE AREAS IN INDONESIA (THE CASE OF KAMPUNG ZAKAT OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS)

B. SKEMA, BIDANG, TEMA, DAN TOPIK PENELITIAN

Skema Penelitian	Bidang Fokus Penelitian	Tema Penelitian	Topik Penelitian
Penelitian Penugasan Strategis	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Penguatan modal sosial	Rekayasa sosial & pengembangan pedesaan.

C. KOLABORASI DAN RUMPUN ILMU PENELITIAN

Jenis Kolaborasi Penelitian	Rumpun Ilmu 1	Rumpun Ilmu 2	Rumpun Ilmu 3
Kolaboratif Luar Negri	ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU SOSIAL	Humaniora

2. IDENTITAS PENELITIAN

Nama	Peran	Tugas
Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D.	Ketua Pengusul	
Abd. Madjid, Dr., M.Ag.	Anggota Pengusul	Merumuskan instrument evaluasi dan assesment dan melakukan analisis
Praba Jangkar Kusuma	Mahasiswa	Mengumpulkan literatur terbaru dan melakukan observasi awal

Nama	Peran	Tugas
	Bimbingan	lapangan
Dr. Philip Kreager	Pakar Bidang	Melakukan review dan memberikan analisis terhadap hasil penelitian dan menjadi co- author

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Kepakaran
INSTITUTE OF HUMAN SCIENCES OXFORD UNIVERSITY	Dr. Philip Kreager	Civil Society, Ageing, and Cultural Anthropology

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun	Jenis Luaran
1	Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (SCOPUS)
2	Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (SCOPUS)

Luaran Tambahan

Tahun	Jenis Luaran
1	Publikasi (Minimal Jurnal SINTA 3)

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Total Keseluruhan RAB Rp. 40,830,000

Tahun 1 Total Rp. 40,830,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
BAHAN	Barang Persediaan	Buku referensi	Unit	1	Rp. 3,510,000	Rp. 3,510,000
BAHAN	Bahan (Habis Pakai)	Tinta Print	Unit	1	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000
PENGUMPULAN DATA	Tiket	Papua	OK(Kali)	2	Rp. 5,000,000	Rp. 10,000,000
PENGUMPULAN DATA	Penginapan	Hotel	OH	2	Rp. 1,500,000	Rp. 3,000,000
PENGUMPULAN DATA	Tiket	Yk-Jkt-Banten PP	OK(Kali)	1	Rp. 4,700,000	Rp. 4,700,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
PENGUMPULAN DATA	Penginapan	Jkt/Banten	OH	1	Rp. 6,300,000	Rp. 6,300,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Publikasi Artikel di Jurnal Internasional	Submission and proof reading	Paket	1	Rp. 8,320,000	Rp. 8,320,000
PENGUMPULAN DATA	Uang Harian	Uang saku	OH	2	Rp. 150,000	Rp. 300,000
SEWA PERALATAN	Transport	Sewa Mobil	OK(Kali)	1	Rp. 100,000	Rp. 100,000
PENGUMPULAN DATA	HR Pembantu	Tenaga lokal Papua lokal	OJ	1	Rp. 100,000	Rp. 100,000
ANALISIS DATA	HR Pengolah Data	Tenaga admin	Per Penelitian	1	Rp. 250,000	Rp. 250,000
PENGUMPULAN DATA	Transport	Sewa Mobil di Banten	OK(Kali)	1	Rp. 70,000	Rp. 70,000
PENGUMPULAN DATA	Uang Harian	Uang saku	OH	3	Rp. 60,000	Rp. 180,000

5. LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA:

Judul	: ISLAM AND ENTREPRENEURSHIP: AN ASSESSMENT OF THE COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT IN REMOTE AREAS IN INDONESIA (THE CASE OF KAMPUNG ZAKAT OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS)
Peneliti/Pelaksana	: Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D.
NIDN	: 0512097501
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Program Studi/Fakultas	: Psikologi Pendidikan Islam
Nomor HP	: 082126010203
Alamat surel (e-mail)	: h_latief@umy.ac.id
Anggota	
Nama	: Abd. Madjid, Dr., M.Ag.
NIDN	: 0504036101
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi/Fakultas	: Psikologi Pendidikan Islam
Nama	: Praba Jangkar Kusuma
NIM	: 20160730110
Prodi	: Ekonomi & Perbankan Islam
Nama	: Dr. Philip Kreager
NIK	: 00000000000
Institusi	: Institute of Social and Cultural Anthropology, Oxford University

Mitra : INSTITUTE OF HUMAN SCIENCES OXFORD UNIVERSITY
Nama Mitra : Dr. Philip Kreager
Kepakaran : Civil Society, Ageing, and Cultural Anthropology

Biaya : Rp. 40,830,000

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala LP3M,


Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM
NP. 196210231991031003

6. RINGKASAN

This paper explores the experiences of Indonesian Muslim philanthropy organizations in reframing the concept of philanthropy as well as in coping with economic disparities among Indonesian societies. In particular, this paper pays attention to the philanthropy and entrepreneurship projects in rural areas run by Muslim organizations. This paper asks: how Muslim philanthropy organizations handle rural development issues; and how ideas of entrepreneurship are incorporated into rural development projects within Muslim philanthropy organizations? What are the challenges faced by Muslim philanthropy organizations in coping with rural development projects?

7. KEYWORDS

Islamic philanthropy, rural development, poverty

8. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Latar belakang

Selama Konferensi World Zakat Forum yang diadakan di Jakarta pada tahun 2017 dan Festival Halal yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2018, sejumlah organisasi filantropi Islam mendirikan stan dan galeri untuk memamerkan industri rumah tangga dan produk pertanian mereka. Mereka memamerkan hasil-hasil pertanian, seperti kemasan kopi yang diambil dari beberapa provinsi di Indonesia, jajanan ubi dan kentang dengan berbagai rasa, produk makanan (daging, ikan, makanan tradisional, dll). Begitu pula dengan produk-produk industri rumah tangga seperti kain batik (“pewarnaan tahan lilin” tradisional), pakaian, dan lain-lain, yang dibuat dan diproduksi oleh masyarakat juga ditampilkan. Sebagian besar produk yang ditampilkan selama festival mewakili hasil proyek pembangunan pedesaan. Selain itu juga disajikan gambar-gambar kegiatan ekonomi untuk memberitahukan kepada para pengunjung tentang pergeseran konsep program filantropi dan transformasi praktik amal menjadi kegiatan penghasil pendapatan produktif dengan jiwa kewirausahaan. Penjaga stan berbagi 'narasi yang identik' dengan pengunjung, menekankan bahwa dana zakat telah digunakan dan disalurkan tidak hanya untuk meringankan penderitaan dan untuk memberi manfaat kepada orang miskin tetapi juga untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat di antara rumah tangga berpenghasilan rendah.

Selama bertahun-tahun organisasi sukarela, termasuk asosiasi filantropi Muslim, di Indonesia, telah berupaya untuk menerjemahkan aktivisme filantropi menjadi proyek sosial yang strategis secara ekonomi dan inovatif dalam menyelesaikan masalah sosial, memberdayakan masyarakat, serta dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tren percepatan pembangunan masyarakat saat ini adalah kewirausahaan atau kewirausahaan sosial. Pemanfaatan perspektif kewirausahaan semakin populer di kalangan umat Islam, penduduk terbesar di Indonesia, melalui organisasi mereka yang bekerja di komunitas. Mereka menyadari bahwa sejumlah besar rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar amal dan pelayanan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), angka kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan, menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang kompleks dan tipis, yang kemudian berdampak pada kualitas pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Bersamaan dengan itu, Indonesia merupakan rata-rata Gini Ratio tertinggi kedua di Asia setelah China.

Tabel. Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Poverty	Year										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rural poverty	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8	14.2	14.1
Urban poverty	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2	8.3	7.7

Karena tingginya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antara pedesaan dan perkotaan, serta kemajuan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antara beberapa wilayah di Indonesia, seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 131 tentang Penetapan tersebut. Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dimana pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada 122 Kabupaten di Indonesia.

Tampaknya tugas pembangunan pedesaan saat ini merupakan keberlanjutan dari narasi besar bangsa Indonesia yang digaungkan oleh berbagai pelaku, termasuk organisasi filantropi. Belakangan ini, ada upaya di kalangan organisasi filantropi Muslim untuk memberi perhatian khusus pada masalah pembangunan pedesaan. Pada tahun 2018, Kementerian Agama yang dalam konteks politik Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi filantropi Muslim, mengundang ormas-ormas Muslim dalam pertemuan yang secara khusus membahas dan memaparkan kemungkinan partisipasi organisasi filantropi untuk mengatasi masalah pedesaan. Berdasarkan data yang diambil dari beberapa sumber, Kementerian Agama menghimbau agar setiap organisasi filantropi muslim bertanggung jawab atas beberapa desa di Indonesia sesuai dengan kapasitas organisasinya. Beberapa desa, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa, diidentifikasi sebagai lokasi dampingan. Proyek pembangunan pedesaan yang diekspos secara nasional ini disebut “Kampung Zakat” (Desa Zakat). Tujuan Desa Zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas. Ada lima sektor di desa yang akan dibenahi oleh organisasi filantropi Muslim: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah (Soleh 2019). Wilayah kerja Desa Zakat terbagi menjadi tiga sektor: Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Bagian Timur. Di banyak daerah, angka kemiskinan parah terutama ditemukan di daerah pedesaan.

Pada tahun 2018, Kementerian Agama meluncurkan program Kampung Zakat. Pada awalnya terdapat 17 desa yang tersebar di berbagai provinsi sebagai sasaran. Pada periode pertama, pemerintah menargetkan tujuh lokasi: 1) Lebak (Banten); 2) Seluma (Bengkulu); 3) Belu (Nusa Tenggara Timur); 4) Lombok Timur (NTB); 5) Sambas (Kalimantan Barat); 6) Raja Ampat (Papua Barat); 7) Halmahera Timur (Maluku Utara). Pada periode kedua Kementerian Agama menunjuk tujuh lokasi lainnya: 1) Kota Bekasi (Jawa Barat); 2) Nabire (Papua); 3) Pulau Buru (Maluku); 4) Indagiri Hilir (Riau); 5) Bulukumba (Sulawesi Selatan); Singkil (Aceh); dan 7) Nunukan (Kalimantan Utara). Ada beberapa kriteria desa yang layak mendapat bantuan dari lembaga filantropi: desa tersebut harus dihuni tidak kurang dari 100 KK, desa tersebut memiliki potensi ekonomi, desa tersebut secara resmi dianggap belum berkembang, dan lokasinya 'mudah' terjangkau (Soleh 2019).

Ketika organisasi filantropi Islam, yang sebagian diwakili oleh lembaga zakat, menjadi semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir 1990-an dan lanskap politik juga memberikan kesempatan bagi organisasi filantropi Muslim untuk berkembang, sektor pembangunan pedesaan mulai berkembang. Berbagai istilah selama ini digunakan oleh organisasi filantropi Islam untuk melabeli proyek pedesaan mereka, seperti Desa Berdaya (Desa Berdaya), Masyarakat Mandiri (Komunitas Mandiri), dll. Organisasi filantropi Muslim seperti Rumah Zakat, BAZNAS, Dompot Dhuafa dan Lazismu berbagi narasi yang sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana organisasi filantropi Muslim menangani isu-isu pembangunan di daerah terpencil; dan bagaimana gagasan kewirausahaan Islam dimasukkan ke dalam proyek pembangunan pedesaan dalam masyarakat sipil Muslim dan organisasi filantropi? Apa tantangan yang dihadapi oleh organisasi Muslim dalam menangani proyek pembangunan pedesaan di daerah terpencil?

Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh pengamat dan aktivis LSM tentang efektivitas kerja amal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada 2008, Nic Frances dan Mayrose Cuskelly menerbitkan buku menarik berjudul *The End of Charity: Time for Social Enterprises*. Buku ini memperhatikan isu-isu seperti perubahan sosial, kesejahteraan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan, dan bagaimana memberi energi pada dampak proyek sosial yang dijalankan oleh organisasi amal. Proposal buku ini berkaitan dengan penciptaan ekosistem perubahan sosial, yang bukan hanya praktik amal. Para penulis berpendapat, "kita perlu bergerak melampaui pengertian tentang amal dan kesejahteraan, melampaui perbuatan baik dan rasa bersalah, ke sistem yang mengakui kompleksitas nilai-nilai kita dan pemahaman yang realistis tentang bagaimana kita dapat mendukungnya" (Frances dan Cuskelly 2008, 1)

Karena aktivisme amal tidak lagi cukup untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, penulis mengusulkan "usaha sosial" sebagai cara untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Frances dan Cuskelly juga menyarankan: "Seorang wirausaha sosial bukan hanya seseorang yang inovatif dalam memberikan layanan dengan tetap mengandalkan pendanaan dari sumbangan filantropi dari hibah pemerintah. Seorang wirausaha sosial sejati menemukan batas antara tujuan sosial dan membangun basis konsumen untuk layanan yang memberikan tujuan tersebut" (Frances dan Cuskelly 2008, 8).

Istilah lain untuk menunjukkan karya yang lebih kreatif dan inovatif untuk perubahan sosial yang dirumuskan oleh pengamat dan praktisi disebut "kewirausahaan sosial". Konsep ini mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan dalam mencari keuntungan dan mengubahnya menjadi perubahan sosial. Ide dasar dari kewirausahaan sosial adalah menyelesaikan masalah sosial dengan tidak mencari keuntungan baik untuk investor yang telah mendanai proyek atau untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, para pendukung kewirausahaan sosial, seperti dicatat oleh Paul C. Light, mencari "perubahan skala besar yang berkelanjutan melalui ide-ide pemecah pola dalam apa yang dilakukan pemerintah, organisasi nirlaba, dan bisnis untuk mengatasi masalah sosial yang signifikan" (Light 2008, 12). Dengan mengikuti makna di atas, Light juga merumuskan kewirausahaan sosial sebagai "upaya untuk memecahkan masalah sosial yang sulit diselesaikan melalui perubahan pemecah pola (Light 2008, 12).

Mengambil eksposisi wirausaha sosial atau kewirausahaan sosial di atas, saya ingin membawa lebih jauh gagasan filantropreneurship untuk menganalisis tren filantropi saat ini untuk ekonomi berkelanjutan di kalangan komunitas Muslim. Sebagaimana dicatat oleh Rajesh Chandy (2014), "filantropena yang sukses adalah mereka yang bertanggung jawab atas solusi yang berdampak, terukur, dan berkelanjutan." Artinya, aksi filantropi dapat diproyeksikan untuk mempengaruhi sifat organisasi sehingga memberikan dampak yang lebih komprehensif dan berjangka panjang bagi penerima manfaat yang layak. Ada empat unsur Filantropreneurship: 1) berusaha untuk membuat hidup yang lebih baik, 2) diperkuat dengan praktek memberi baik secara materi (uang) maupun tidak (waktu), 3) pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah, dan 4) kepemimpinan yang berpengaruh. Karenanya, filantropreneurship mirip dengan apa yang oleh Rath dan Schuyt (2014) disebut sebagai "pendekatan pasar filantropi" sebagai bagian dari "filantropi wirausaha." Sifat filantropreneurship adalah perubahan sosial yang inovatif yang ditopang oleh tindakan sukarela yang dinamis, terutama para donor, dalam mempertahankan dampak jangka panjang pada penerima manfaat dan dermawan atau organisasi.

Pembangunan perdesaan bukanlah hal baru dalam wacana sektor pembangunan di Indonesia. Seperti di tempat lain pembahasan pembangunan pedesaan sama tuanya dengan wacana pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Segera setelah Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mempercepat proyek-proyek pembangunan pada tahun 1950-an, terutama di pedesaan. Berbagai skema, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, dan irigasi hingga proyek populis seperti Padat Karya dan subsidi untuk desa, disediakan oleh pemerintah untuk memberi energi pada kegiatan desa dan pertanian (Birowo & Hansen 2018). Begitu pula pada tahun 1960-an hingga saat ini, ketika Indonesia menyaksikan kebangkitan sektor LSM, organisasi masyarakat sipil dan LSM telah banyak memperhatikan daerah pedesaan

dan menggunakan berbagai strategi, mulai dari pemberdayaan pemimpin lokal, melibatkan perempuan, menyediakan teknologi baru, sebagai serta meningkatkan teknologi internet (Beard 2005; Nugroho 2010).

Organisasi filantropi muslim, dengan kemampuan finansial, logis dan praktis yang terbatas, telah menawarkan 'pendekatan kreatif' terhadap permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kapasitas masyarakat setempat. Dalam konteks pedesaan yang sebagian besar bercirikan budaya pertanian, program-program yang ditawarkan dan diciptakan oleh organisasi-organisasi filantropi muslim, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan ketahanan pangan dan penghidupan, seperti bagaimana meningkatkan pendapatan, menumbuhkan kualitas sistem pertanian, untuk meningkatkan nutrisi, dll. Selain itu, untuk sukses

Pendistribusian produk home industri, pendampingan perbaikan sistem pengemasan dan pengapalan, penguatan teknologi, serta perluasan jaringan pasar, juga dilakukan oleh organisasi filantropi. Artinya, perspektif mata pencaharian tetap menjadi pendekatan dominan dalam proyek pembangunan pedesaan di Indonesia, seperti di tempat lain di negara berkembang (Lihat Ian Scoones 2009; Shackleton, et al., 2001). Nampaknya soft skill, termasuk komitmen pada pelestarian nilai-nilai Islam menjadi salah satu tujuan filantropi muslim dalam proyek pembangunan pedesaan mereka. Organisasi filantropi muslim telah mengatasi masalah dalam menopang ekonomi di daerah pedesaan dengan memperkuat "pembentukan modal sosial" di antara penduduk desa (Mondal 2000), karena mereka juga menyadari bahwa kegagalan ekonomi berkelanjutan di kalangan masyarakat miskin dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan modal sosial yang rapuh (Micheline 2013).

Dalam roadmap penelitian saya, topik ini merupakan kontinum dari karya saya sebelumnya tentang filantropi Islam yang telah saya lakukan selama 15 tahun terakhir. Dengan melibatkan pembangunan pedesaan, terutama di daerah terpencil, saya akan memperluas hasil penelitian saya dengan menghasilkan kertas kebijakan serta makalah akademis untuk meningkatkan kapasitas filantropi Muslim dalam mengatasi kemiskinan pedesaan.

Metode Penelitian

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 menyebabkan diberlakukannya physical distancing, bahkan pada periode awal penyebaran virus tersebut Pemerintah mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia mengurangi aktifitas di luar rumah. Dengan kata lain, seluruh aktifitas seperti bekerja, belajar, interaksi sosial, bahkan beribadah agar tetap dilakukan di rumah. Tentu ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dalam keadaan yang demikian, tidak memungkinkan untuk melakukan studi

lapangan ataupun melakukan Focus Group Discussion (FGD) khususnya di lokasi program kampung zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan kajian literature seperti laporan, artikel jurnal, berita-berita di media online, serta sumber informasi lainnya yang terkait dengan program kampung zakat.

Program Kampung Zakat: Studi Kasus di Empat Lokasi Program

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Dirjen Bimbingan masyarakat Islam) dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga filantropi Islam yaitu Baznas (diberbagai tingkatan) serta Lembaga Amil Zakat meluncurkan program “Kampung Zakat”. Program ini di desain untuk membantu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong produktifitas masyarakat khususnya di daerah yang tertinggal. Dengan demikian program ini lebih mengedepankan pemberdayaan (empowerment) dibanding dengan santunan (charity). Program yang dilakukan cukup berbeda karena melibatkan pemerintah khususnya tingkat daerah dengan berbagai lembaga filantropi. Lokasi program diutamakan di 122 kabupaten yang menjadi fokus pemerintah berdasarkan Perpres No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tahun 2015-2019. Dari 122 kabupeten tersebut kemudian “dipersempit” dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu paling sedikit terdapat 100 kepala keluarga, memiliki potensi ekonomi yang belum berkembang, berada di wilayah tertinggal, serta mudah dijangkau.

Lebih spesifik, daerah-daerah yang masuk ke dalam kriteria di atas kemudian dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ). IDZ terdiri dari lima dimensi yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial-kemanusiaan. Pengukurang IDZ sendiri menggunakan skor antara 0 (nol) hingga 1 (satu), semakin rendah skor –dengan kata lain mendekati 0 (nol)- maka desa tersebut akan menjadi prioritas untuk dijadikan lokasi program. Sebaliknya, jika skor semakin tinggi atau mendekati 1 (satu) maka wilayah tersebut tidak menjadi prioritas. Selain itu, program didesain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, di dalam proses penyusunan program selain dengan melakukan tinjauan lapangan juga melibatkan tokoh masyarakat. Pelaksanaan program kampung zakat di desain untuk selesai dalam waktu tiga tahun dan terbagi dalam tiga tahap, yaitu pendirian, pelaksanaan, dan kemandirian.

Pada tahun 2018, sebanyak 7 lokasi dijadikan sebagai pilot project, yaitu Longserang Timur (NTB), Ciladaeun (Banten), Jenilu (NTT), Sidomulyo (Bengkulu), Telaga Jaya (Maluku Utara), Harapan Jaya (Papua Barat) dan Sulung (Kalimantan Barat). Setahun berikutnya (2019), program di perluas ke 7 lokasi lainnya, yaitu di Situbuh-tubuh (Aceh), Sumur Batu (Jawa Barat), Kampung Gamei Jaya (Papua), Kampung Waileman (Maluku), Sungai Beringin (Riau), Kahaya

(Sulawesi Selatan), dan Sei Limau (Kalimantan Utara). Penelitian ini mengambil studi kasus 3 kampung zakat yang diresmikan pada tahun 2018 dan 1 kampung zakat yang dibentuk tahun 2019.

Kampung Zakat Desa Longserang Timur, Lombok Barat

Program kampung zakat di Desa Longserang merupakan program pilot project kampung zakat yang pertama. Program ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2018 dan menjadi rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional Forum Zakat VIII (Republika, 2018). Dusun Longserang Timur terletak di Desa Cilangko, Kecamatan Langsir, Lombok Barat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun pertama di kampung zakat ini, diantaranya:

Aspek pendidikan

- Pemberian bantuan tas sekolah
- Pemberian bantuan buku
- Pemberian bantuan seragam sekolah bagi anak wajib belajar

Aspek ekonomi

- Kerajinan anyaman ketak
- Produksi Gula semut

Aspek Kesehatan

- Perawatan lansia

Aspek sosial

- Bedah rumah
- Bantuan tandon/penampungan air
- Saung beratap ilalang

Aspek Dakwah

- Pembinaan yasinan keliling
- Pembangunan tempat wudhu dan toilet masjid

Program pada aspek ekonomi nampaknya menjadi program unggulan di kampung zakat Desa Cilangko. Baznas melalui Zakat Community Development (ZCD) melakukan pendampingan usaha terhadap kelompok dua pengrajin anyaman ketak dengan masing-masing anggota 10 orang dan 20 orang. Selain itu, ZCD juga melakukan pendampingan terhadap

kelompok usaha gula semut. Anyaman ketak berbahan dasar tanaman ketak dan merupakan tanaman lokal. Permasalahan utama para pengrajin anyaman sebelum dibentuk kampung zakat adalah keterbatasan modal. Pada saat itu, kebutuhan modal dan bahan baku sangat bergantung pada para pengepul, sehingga tingkat pendapatan para pengrajin relatif kecil. Oleh karena itu dengan adanya kampung zakat setidaknya kedua permasalahan tersebut dapat terselesaikan (Liputan.co.id, 2019). Baznas juga memberikan program rumah kemas NTB untuk memperkuat branding produk masyarakat, khususnya untuk produk gula semut (Baznas, 2020).

Pada tahun 2019, atau satu tahun setelah program dijalankan terlihat adanya perkembangan yang signifikan dari kelompok kerajinan yang didampingi. Hal ini terlihat dari perluasan jangkauan pemasaran kerajinan. Jika sebelumnya pasar kerajinan ketak hanya di tingkat lokal, Kini, kerajinan anyaman ketak telah masuk ke pasar internasional seperti Jepang dan Belanda (ngopibareng.id., 2019). Dengan adanya perluasan pasar ini tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat utamanya yang tergabung di dalam kelompok yang didampingi. Pada tahun 2020 ini Baznas memperluas pendampingan dengan memberikan pelatihan kerajinan ingke. Program ini juga merupakan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Baznas, 2020). Selain itu, selama masa pandemi ini, Baznas juga membantu dalam pemasaran produk gula semut dengan menggandeng koperasi Kantor Gubernur NTB dengan system konsinyasi (Baznas, 2020). Kegiatan bedah rumah yang merupakan bagian dari program sosial nampaknya juga menjadi salah satu perhatian lembaga-lembaga yang terlibat. Pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 24 unit rumah layak huni telah dibangun.

Memasuki tahun ketiga (2020), program kampung zakat di desa Cilangko ini diperluas. Pada pendidikan misalnya akan dibangun fasilitas Pendidikan Anak Usia dini. Pada bidang dakwah akan dibangun Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Demikian halnya pada bidang kesehatan lembaga-lembaga terkait akan membangun fasilitas MCK. Jika dilihat, pada tahun ketiga ini beberapa program baru difokuskan pada pembangunan fasilitas publik. Barangkali ini tidak terlepas dari adanya kerusakan fasilitas publik yang disebabkan oleh bencana gempa alam di pertengahan tahun 2018.

Virus Covid-19 yang telah menyebar di berbagai pelosok negeri dan menyebabkan gangguan pada seluruh aspek kehidupan utamanya ekonomi dan kesehatan. Beberapa lembaga yang tergabung dalam program kampung zakat di desa Cilangko juga memberikan perhatian lebih kepada warga yang terdampak. Lembaga zakat seperti Rumah Yatim, BMH dan LAZ DASI NTB berkolaborasi dalam menyalurkan program pangan yaitu dalam bentuk sembako Bantuan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu meringankan beban yang dialami masyarakat akibat

pandemic (ILiputan.co.id, 2019). Tidak ketinggalan, Baznas juga menyalurkan Paket Logistik Keluarga (PLK) pada bulan Ramadhan untuk 50 KK (Baznas, 2020).

Kampung Zakat Sidomulyo, Bengkulu

Kampung Zakat Sidomulyo diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2018. Sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja pada sektor pertanian dengan komoditi utamanya kelapa sawit (BPS Seluma, 2019). Salah satu alasan pemilihan Sidomulyo untuk dijadikan sebagai kampung zakat adalah karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Seluma (Asnaini dkk, 2020). Hasil assessment yang dilakukan oleh tim survey Baznas pusat menunjukkan bahwa kemiskinan di Kelurahan Sidomulyo mencapai 60% (Asnaini dkk, 2020). Kelurahan Sidomulyo memiliki luas sekitar 3,09 km² dan berjarak sekitar 3 km dari ibukota kecamatan (BPS Seluma, 2019). Sidomulyo menjadi salah satu kelurahan di Seluma Selatan yang tidak memiliki pasar, baik pasar permanen maupun non-permanen (BPS Seluma, 2019). Kelurahan Sidomulyo memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD/TK hingga SMA, selain itu juga terdapat 1 pondok pesantren.

Tabel Ketersediaan Fasilitas/Layanan

Sektor	Jenis layanan/fasilitas	Jumlah
Pendidikan	PAUD/TK	2
	SD/MI	2
	SLTP	1
	SMA	1
Keagamaan	Pondok pesantren	1
	Masjid	3
	Mushola	5

Sumber: Isnaini, dkk., 2020

Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh tim Baznas pusat, terdapat 19 program yang ditargetkan, yaitu (Isnaini dkk, 2020):

1. Tersedianya akses permodalan syariah
2. Terbukanya akses pasar
3. Produksi berkelanjutan dan terjaga kualitasnya
4. Revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan
5. Pengajian keagamaan rutin seminggu sekali
6. Tersedianya dai yang berdakwah di Kelurahan Sidomulyo
7. Akses pelayanan kesehatan tersedia rutin
8. Perekrutan kader kesehatan berjalan baik

9. Pelatihan manajemen usaha
10. Pemberian modal usaha melalui koperasi BMD
11. Pembukaan akses pasar melalui koperasi BMD
12. Pendirian koperasi BMD
13. Pengiriman dai kikal
14. Pembuatan jadwal pengajian umum rutin di tiga masjid
15. Pembuatan jadwal TPQ di tiga masjid
16. Bantuan pembuatan sumur bor untuk masjid yang kesulitan air
17. Revitalisasi jadwal rutin pemeriksaan kesehatan masyarakat
18. Bantuan fee kader kesehatan dan regenerasi kader kesehatan baru

Tidak banyak publikasi yang dilakukan terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan di kampung zakat Sidomulyo. Beberapa program dan kegiatan yang dijalankan di daerah tersebut diantaranya dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu (IZI, 2020):

- Pada 28 September 2019 Memberikan beasiswa untuk 50 pelajar, berupa bantuan biaya bulanan selama 1 tahun, tas sekolah, buku, al-Qur'an, dan perlengkapan sekolah lainnya (IZI, 2019).
- Bantuan sumur bor untuk sekolah dan masyarakat kerjasama dengan PT. Paragon (IZI, 2019). Kelurahan Sidomulyo merupakan daerah dengan akses air bersih yang cukup sulit, terlebih pada musim kemarau. Bahkan, sudah menjadi kebiasaan bagi siswa di sekolah-sekolah yang ada di kelurahan tersebut untuk membawa air bersih dengan dirijen ke sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya sumur bor ini kebutuhan akan air bersih oleh masyarakat dan sekolah dapat terpenuhi dengan baik.
- Mendirikan akademi pelatihan keterampilan jahit untuk memberikan pelatihan menjahit dengan durasi 8 bulan untuk dua kelompok.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini, dkk (Mei sampai November 2019) menunjukkan bahwa program kampung zakat di Sidomulyo belum sesuai yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa desa mereka dijadikan sebagai kampung zakat. Survey yang dilakukan oleh Isnaini dkk menemukan hanya 5 dari 50 orang yang mengetahui adanya program kampung zakat di desa mereka. Ironisnya kelima orang tersebut adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat. Lebih dari itu, mereka yang mengetahui bahwa Sidomulyo dijadikan sebagai kampung zakat, namun mereka tidak mengetahui dengan jelas tujuan, target dan seperti apa bentuk program dan kegiatannya. Selain itu, yang menjadi perdebatan adalah klaim tim survey Baznas Pusat bahwa kemiskinan di daerah tersebut mencapai 60%. Sebagian masyarakat dan Bimas Kemenag Provinsi Bengkulu meragukan angka

kemiskinan tersebut, mereka menganggap hasil survey tersebut *overestimated*. Lebih jauh, penelitian Isnaini juga menunjukkan adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kelurahan, Baznas daerah, provinsi, pusat dan Kemenag, sehingga beberapa program yang akan dilaksanakan seperti misalnya pembangunan sumur bor di tiga titik belum dapat terlaksana. Secara keseluruhan hasil penelitian Isnaini dkk menyimpulkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 19 program yang ditargetkan baru bisa terlaksana 4 program.

Program Kampung Zakat di Desa Ciladaeun, Banten

Program Kampung Zakat di Desa Ciladaeun diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2018. Ciladaeun salah satu desa di Kecamatan Lebakgedong yang pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 3.211 jiwa dengan persentase laki-laki lebih besar yaitu mencapai 51,7%. Desa ini terletak sekitar 7 km dari pusat kecamatan. Lebih dari 50% penduduk bekerja di sektor pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik sektor pertanian adalah potensi yang dimiliki oleh desa ini. Persiapan pembentukan kampung zakat telah dilakukan sejak bulan Mei di tahun yang sama diantaranya peninjauan lapangan dan *focus group discussion* (FGD). Program di desa ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun, atau tahun 2020. Kampung Zakat di Ciladaeun merupakan kerjasama antara Kemenag, pemerintah daerah, BAZNAS dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Banten (BMM, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Gema Indonesia Sejahtera, Yakesma, Global Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, DT Peduli, Al Azhar, Harfa, serta Yatim Mandiri), serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya seperti Masyarakat Ekonomi Syariah PW Banten (Republika, 2018).

Tabel 1 menampilkan data fasilitas atau layanan publik yang terdapat di Desa Ciladaeun pada tahun 2018. Pada Sektor pendidikan, Ddsd tersebut memiliki PAUD, SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, namun belum memiliki TK dan SMA/ sederajat. Berkaitan dengan layanan kesehatan, Desa ini memiliki 4 posyandu lansia, 1 poliklinik, dan 1 praktek bidan. Meski demikian, layanan puskesmas terdekat berjarak sekitar 8 km. Di desa tersebut terdapat 5 pondok pesantren dan 21 TPA. Berkaitan dengan ekonomi, selain bekerja di sektor pertanian di desa tersebut juga terdapat berbagai Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) utamanya kerajinan, seperti pengolahan emas, anyaman, makanan/minuman, dan kerajinan kayu. Namun, di desa tersebut belum terdapat pasar –salah satu pusat dari aktifitas perekonomian.

Tabel 1. Ketersediaan Fasilitas/Layanan 2018

Sektor	Jenis layanan/fasilitas	Jumlah
Pendidikan	PAUD	2
	TK	0
	SD/MI	2

	SLTP/ sederajat	1
	SMA/ sederajat	0
Kesehatan	Posyandu	4
	Poliklinik	1
	Praktek bidan	1
Keagamaan	Pondok pesantren salafi	5
	Pondok pesantren modern	0
	TPA	21
	Masjid	2
	Mushola	7
Ekonomi	Kerajinan kayu	1
	Pengolahan emas	41
	Kerajinan anyaman	4
	Kerajinan makan/minuman	3
	Industri lainnya	4
	Warung	94
	Grosir	2
	Pasar	0

Sumber: Kecamatan Lebakgedong dalam Angka, 2019

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu proses yang dilakukan sebelum menentukan lokasi program adalah dengan melakukan penilaian IDZ. Hasil penilaian IDZ di desa Ciladaeun ditampilkan pada tabel 2. Data menunjukkan bahwa aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dakwah memiliki skor kurang dari 0,5, sementara untuk aspek sosial-kemanusiaan mendapatkan skor yang lebih tinggi yaitu 0,63. Secara umum seluruh aspek yang dinilai masih cukup jauh dari angka 1 (satu). Dengan demikian data tersebut memberikan gambaran bahwa IDZ di Desa Ciladaeun masih cukup rendah, sehingga masuk ke dalam prioritas.

Tabel Skor IDZ Desa Ciladaeun

Aspek	Nilai IDZ
Ekonomi	0,37
Kesehatan	0,43
Pendidikan	0,47
Dakwah	0,41
Sosial-Kemanusiaan	0,63

Sumber: bimasislam.kemenag (2019).

Berdasarkan hasil FGD dan assessment terhadap kondisi desa, dirumuskan beberapa program yang dirumuskan dalam sebuah Action Design yang akan dilakukan di Ciladaeum yaitu¹:

1. Pengembangan masyarakat desa pada bidang ekonomi dengan pelatihan ekonomi kreatif
2. Pemberian bantuan kesehatan dan sanitasi untuk masyarakat
3. Pengembangan pendidikan masyarakat
4. Peningkatan sosial keagamaan

Secara umum program-program tersebut mencakup ke lima aspek yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Untuk memastikan bahwa program dan dapat berjalan dengan baik, maka dibentuk koordinator yang membidangi setiap aspek. Berdasarkan beberapa program di atas, beberapa kegiatan yang akan dilakukan dan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Aspek pendidikan

- Rumah pintar
- Beasiswa
- Rumah baca

Koordinator pada aspek pendidikan adalah Rumah Zakat

2. Aspek ekonomi

- Pengembangan usaha gula aren
- Pemberdayaan perempuan
- Pengembangan keahlian (service handphone atau sepeda motor)
- Program kelompok petani cengkeh
- Pembentukan kampung wisata
- Program ternak desa berdaya atau hewan
- Pengembangan ikan air tawar dan pusat kegiatan
- Pelatihan ekonomi syariah dan pelatihan manajemen ekonomi keluarga

Koordinator pada aspek ekonomi adalah Baznas Banten

3. Aspek kesehatan

- Air bersih dan sanitasi
- Kebun sehat keluarga

Koordinator pada aspek kesehatan adalah LAZ Hafara

¹ <https://banten.kemenag.go.id/peresmian-action-design-kampung-zakat-di-lebakgedong/>

4. Aspek Dakwah

- Program pendidikan baca tulis Al-Quran dan pelatihan guru gaji

Koordinator pada aspek dakwah adalah BM Hidayatullah

5. Aspek sosial keagamaan

- Penggalangan dana jembatan gantung
- Rumah momong

Koordinator pada aspek sosial-keagamaan adalah Dompot Dhuafa

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan di atas dilaksanakan mulai bulan November 2018. Hingga saat ini program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta pengelolaannya adalah:

1. Bidang Pendidikan

Pada bidang Pendidikan terdapat beberapa lembaga yang tergabung atau terfokus pada bidang ini, yaitu:

a. LAZGIS

Program yang dilaksanakan oleh LAZGIS:

- Pengadaan program kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
- Penyetaraan kejar paket A dan B bagi masyarakat yang belum tamat 9 tahun (karena didesa Ciladeun banyak yang putus sekolah) (LAZGIS, 2018).

b. Yatim Mandiri

Desa Ciladaeun Banten dalam aspek pendidikan menerima bantuan program ASA (Alat Sekolah Ceria) berupa tas baru dan alat-alat sekolah. Bantuan ini diberikan oleh Yatim Mandiri Banten bersama dengan FOZ didampingi KEMENAG Provinsi Banten dalam kegiatan aktivasi Kampung Zakat. Yatim mandiri juga akan terus terfokus pada pendidikan dengan program beasiswa SD, SMP, SMA hingga sarjana untuk yatim (Mandiri).

c. Rumah Zakat

Rumah Zakat dalam aspek pendidikan memberikan suatu program kepada peserta didik dengan program Mobil Juara (ZCD, ZCD BAZNAS Dukung Pengembangan Produk Unggulan Olahan Pisang di Kampung Zakat Ciladeun, 2019). Program ini adalah program dengan tujuan sebagai media pembelajaran di luar sekolah dengan memberikan metode penyebaran informasi teknologi, seni, budaya membaca dan permainan yang edukatif. Hal ini dilaksanakan agar peserta didik mampu untuk melek terhadap teknologi informasi yang sehat, berkarakter dan terdidik. Adapun pengimplementasian kegiatan adalah dengan kegiatan kunjungan ke beberapa sekolah jenjang TK/SD atau sederajat

dengan menghadirkan buku bacaan, edukasi internet sehat, permainan/game edukasi, lomba menggambar dan *storytelling* (Wahyudin, 2019).

2. Aspek Ekonomi

a. ZCD (Zakat Community Development) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam aspek ekonomi, ZCD mengembangkan potensi yang ada yakni program pengembangan olahan pisang dan gula aren. Kegiatan pengolahan pisang tersebut, mustahik diberi bantuan peralatan modal, bimbingan, pelatihan dan pendampingan secara terus menerus termasuk dalam aspek pemasaran. Salah satu kelompok KUB Banana Cinta (olahan pisang) dengan anggota kelompok sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari keluarga pra-sejahtera. Aspek pemasaran, ZCD sebagai pendamping program bermitra dengan 212 Mart yang ada di kelurahan Ciujung Timur, kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten. Hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Produk Banana Cinta ini diber harga sebesar Rp 15.000 dengan netto 225 gram. Hingga saat ini terdapat 10 varian rasa untuk olahan keripiknya, yakni rasa jagung bakar, sapi panggang balado, *green tea*, *barbeque* dan lain-lain. Adapun dalam kegiatan pengembangan gula aren dilaksanakan oleh anggota kelompok sebanyak sepuluh KK (ZCD, Produk Mustahik Binaan Kampung Zakat BAZNAS Tembus Minimarket di Banten, 2020).

b. LAZGIS

Selain pada aspek pendidikan, Lazgis juga berkontribusi dalam aspek ekonomi. Program yang dilaksanakan oleh Lazgis pada aspek ekonomi adalah budidaya ikan lele (pemberian modal usaha untuk budidaya ikan lele bagi 10 keluarga miskin di desa Ciladaeun). Kegiatan yang dilakukan meliputi: pembuatan kolam lele, pemberian 10 ribu ekor bibit lele beserta induknya hingga panen, serta pembinaan kepada fakir miskin di desa tersebut (LAZGIS, 2018).

3. Aspek Kesehatan

a. ZCD (Zakat Community Development) BAZNAS

ZCD telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Ciladeun tentang hidup bersih serta pencegahan penanganan kekerdilan (stunting) pada usia bawah lima tahun (Balita). Selain melakukan sosialisasi, ZCD juga melakukan pelatihan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Banana Cinta untuk membuat disinfektan sederhana. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan membantu masyarakat untuk membuat disinfektan sendiri serta memudahkan masyarakat melakukan penyemprotan secara mandiri. Dalam pelatihan tersebut terdapat 9 mustahik yang hadir dan dipandu oleh sahabat ZCD. Pelatihan tersebut menghasilkan 25 liter disinfektan yang

selanjutnya dibagikan kepada para mustahik agar dapat melakukan penyemprotan mandiri di rumahnya masing-masing. Dalam sela-sela kegiatan tersebut, Sahabat ZCD juga memberikan sosialisasi tentang menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) (ZCD, Lawan Covid-19, BAZNAS Latih Mustahik Produksi Disinfektan di Kampung Zakat Banten, 2020).

Selain membantu masyarakat dengan pelatihan membuat disinfektan, ZCD juga membentuk program pembagian 100 masker kain sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 (*Corona Virus Disease*). Program ini bekerjasama dengan Relawan setempat agar pembagian masker yang dilakukan bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dalam program ini, ZCD juga menyalurkan 100 *hand sanitizer*. (Arya, 2020)

b. LAZ Harfa

LAZ harfa bekerjasama dengan LAZ Nurul Hayat dalam melaksanakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada tahap pertama yakni tahun 2018. Jumlah peserta yang ikut serta dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 60 mustahik. Selain kegiatan tersebut juga diadakan program CLTS (*Community Led Total Sanitation*). Program CLTS ini adalah pembuatan jamban tanpa subsidi yakni langsung melibatkan masyarakat baik dari segi pembangunan dan pemeliharannya. Program ini merupakan program dengan tujuan agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya sarana pembuangan air besar bagi kesehatan pribadi dan lingkungan (Yulita, Nurwahidin, & Huda, 2020).

4. Aspek Dakwah

Dalam aspek dakwah, program Kampung Zakat desa Ciladeun telah membuat TPA dan TPQ untuk anak-anak desa Ciladeun serta memberikan pelatihan kepada guru pengajar ngaji (Ricky, 2018).

5. Aspek Sosial-Kemanusiaan

a. IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)

IZI melakukan pemberian sembako sejumlah 50 paket kepada warga setempat yang termasuk dalam 8 asnaf. Ketika banjir melanda desa di Lebakgedong pada akhir tahun 2019, IZI memberikan bantuan berupa peralatan masak untuk dapur umum, sembako dan obat-obatan yang salah satu posko penyalurannya adalah di Desa Ciladaeun (IZI, 2020).

b. BAZNAS

BAZNAS membantu masyarakat desa Ciladeun pada aspek sosial/kemanusiaan dengan membentuk program KATANA (Kampung Tanggap Bencana). Program ini diinisiatif oleh BTB Baznas provinsi Jawa Barat. Program ini dibentuk untuk mewujudkan masyarakat agar mampu untuk mengantisipasi dan meminimalisir bencana melalui

adaptasi serta mampu untuk memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang terjadi (Jabar, 2019).

c. Rumah Zakat

Rumah zakat juga berkontribusi dalam aspek sosial kemanusiaan yakni dengan memberikan bantuan pembangunan jembatan gantung. Kegiatan ini bekerja sama dengan *Vertical Rescue* Indonesia serta dibantu oleh OVO, Grab dan Prudential. Proses pembangunan jembatan jalur provinsi ini telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Jembatan ini merupakan salah satu sarana umum bagi masyarakat dan telah terputus akibat bencana banjir banda di wilayah Banten pada Januari 2020 (Zakat, 2020). Pembuatan jembatan gantung lain yang rusak akibat banjir juga dilaksanakan oleh LAZ Harfa dan BMM serta *Vertical Rescue* Indonesia di Desa Ciladaeun

d. BMM (Laznas Baitulmaal Muamalat)

BMM dalam membantu tercapainya tujuan Program Kampung Zakat desa Ciladeun telah membentuk program Rumah Berkah Muamalat. Program ini merupakan program pembangunan dan perbaikan rumah yang tidak layak huni. BMM telah membangun dan merenovasi sebanyak 21 unit rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat. 21 unit rumah tersebut diantaranya 2 dibangun ulang dan 19 rumah diperbaiki saja. Rumah yang dibangun/diperbaiki dilengkapi dengan fasilitas mandi cuci kakus (MCK), *septic tank* dan sumur resapan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan pada 21 Agustus hingga 26 November 2019 dengan bekerjasama PT Qualita Indonesia (BMM, 2019).

Kampung Zakat Waeleman, Maluku

Kampung zakat Waeleman diresmikan oleh Kemenag pada tanggal 23 Agustus 2019. Desa ini terletak di Kecamatan Waelata, kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Waeleman pada tahun 2018 sekitar 648 orang dengan 57,3% adalah laki-laki. Layanan pendidikan dan kesehatan di desa Waeleman sangat terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa satu-satunya fasilitas pendidikan yang berada di desa tersebut adalah Sekolah Dasar yaitu sebanyak 1 unit. Demikian halnya dengan layanan kesehatan yang mana desa tersebut hanya memiliki posyandu. Layanan lain seperti Polindes, Poliklinik, Puskesmas, apalagi rumah sakit tidak dimiliki. Selain itu, pasar sebagai salah satu pusat aktifitas perekonomian juga tidak dimiliki masyarakat Waeleman.

Tabel Ketersediaan Fasilitas/Layanan di Waeleman

Sektor	Jenis layanan/fasilitas	Jumlah
Pendidikan	SD/MI	1
	SLTP	0
	SMA	0
Kesehatan	Posyandu	1
	Poliklinik	0
	Puskesmas	0
Keagamaan	Masjid	1
	Mushola	5
Ekonomi	Warung	8
	Toko	4
	Pasar	0

Sumber: BPS Kab. Buru, 2019

Beberapa lembaga yang terlibat dalam program kampung zakat di Waeleman adalah Lazismu dan Baznas. Dalam hal ini Lazismu menggarap project pendidikan dan kesehatan, sedangkan Baznas dalam bidang ekonomi. Beberapa program dan kegiatan yang dijalankan diantaranya adalah:

1. Pilar Pendidikan

- Bantuan sarana pendidikan untuk SD N 05 Waelata
- Beasiswa mentari untuk melanjutkan pendidikan SMP. Program ini diberikan kepada 8 orang siswa kelas 6 agar dapat melanjutkan jenjang SMP.

2. Pilar Kesehatan

- Penyediaan fasilitas jamban sehat untuk 69 rumah tangga prioritas
- Sanitasi untuk 48 rumah yang dibagi menjadi 2 tahap dengan masing-masing 24 rumah. Di Kecamatan Waelata kasus diare adalah yang tertinggi dibanding gangguan kesehatan lainnya, yaitu 187 kasus di tahun 2017 menjadi 197 kasus di tahun 2018. Dalam banyak kasus diare dapat disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak bersih. Selain itu, terjadi peningkatan kasus diare di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bantuan jamban sehat dan sanitasi merupakan suatu keharusan di kampung zakat ini.
- Bantuan alat kesehatan untuk Pustu dan Posbindu
Sebagaimana dengan data BPS yang menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan di Waeleman sangat terbatas. Oleh karena itu, melengkapi peralatan kesehatan adalah salah satu pilihan agar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Pilar Ekonomi

Baznas melalui Zakat Community Development melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pilar ekonomi. Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Baznas diantaranya:

- Pemberdayaan kelompok budidaya belut (Baznas, 2020)
- Pemberdayaan kelompok tani sayur dan pembuatan pupuk kompos (Baznas, 2020).

9. KESIMPULAN PENELITIAN

Pedesaan menjadi salah satu isu yang menarik bagi berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan melalui gerakan filantropi. Di Indonesia, program Baznas tentang Kampung Zakat menjadi salah satu ikon yang diharapkan dapat mengakselerasi penguatan masyarakat desa. Keterlibatan berbagai lembaga filantropi Islam di Indonesia ternyata memperkaya perspektif tentang pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa lembaga menawarkan program yang terkait secara spesifik dengan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi atau pengentasan kemiskinan. Keberadaan konsep Kampung Zakat juga menjadikan pembelajaran bagi berbagai lembaga filantropi Islam untuk dapat lebih serius menerjemahkan visi dan misi mereka secara kongkret yang kerap menghadapi berbagai persoalan teknis. Dalam penelitian ini, apa yang terjadi di Maluku, Banten, maupun Sumatra menunjukkan bahkan konsep kampung zakat tidak sepenuhnya sukses karena berbagai persoalan, seperti birokrasi, kesiapan konsep, dan konsistensi relawan.

10. STATUS LUARAN WAJIB

Luaran 1: Draft, *Islamic Philanthropy and Development in Indonesia*.

Luaran 2: Draft, *Islamic 'philanthropreneurship' and Rural Development Projects in Indonesia*

11. DOKUMEN LUARAN WAJIB

Terlampir (berupa draft)

12. LINK LUARAN WAJIB

Tidak ada

13. STATUS LUARAN TAMBAHAN

Selesai dua naskah

14. DOKUMEN LUARAN TAMBAHAN

2 Naskah Publikasi Skripsi

15. LINK LUARAN TAMBAHAN

Belum ada

16. PERAN MITRA (JIKA ADA)

Mengorganisir workshop dan seminar serta persiapan penerbitan hasil penelitian.

17. DAFTAR PUSTAKA

Arya. (2020, April 22). *ZCD Baznas Bagikan Masker, Cegah COVID-19*. Diambil kembali dari juaramedia.com:<http://www.juaramedia.com/2020/04/22/zcd-baznas-bagikan-masker-cegah-covid-19/>.

Asnaini, dkk. *Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf dilengkapi dengan Studi Kasus di Sidomulyo Bengkulu*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

BPS Kab. Seluma. 2019. *Kecamatan Seluma Selatan dalam Angka 2019*.

BPS Kab. Buru. 2019. *Kecamatan Waelata dalam Angka 2019*.

Bajde, Domen (2013), "Marketized philanthropy: Kiva's utopian ideology of entrepreneurial philanthropy", *Marketing Theory*, Volume: 13 issue: 1, pp 3-18.

Best, M. L., & Kumar, R (2008). "Sustainability Failures of Rural Telecenters: Challenges from the Sustainable Access in Rural India (SARI) Project," *Information Technologies and Sustainable Development*, 4 (4): 31-45.

Binswanger, Hans P. (1994). "Agricultural and Rural Development: Painful Lessons", *Agrekon*, 33:4, 165-174, DOI: 10.1080/03031853.1994.9524781.

BMM. (2019, September 2). *Bantuan Rumah Berkah di Kabupaten Lebak, Banten sebagai Bentuk Penyaluran Zakatn Bank Mumalata Baitulmaal Muamalat (BMM)*. Diambil kembali dari Bank Muamalat Baitulmaal Muamalat (BMM): <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/bantuan-rumah-berkah-di-kabupaten-lebak-banten-sebagai-bentuk-penyaluran-zakat-bank-muamalat-dan-baitulmaal-muamalat-bmm111>

Chandy, Rajesh (2014). "Welcome to the new age of philanthropy – philanthropreneurship," <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/dec/08/new-age-ofphilanthropy-philanthropreneurship>).

Harvey, Charles at al. (2011), "Andrew Carnegie and the foundations of contemporary entrepreneurial philanthropy", *Business History*, 53:3, 425-450, DOI: 10.1080/00076791.2011.565516.

- Ian Scoones (2009) Livelihoods perspectives and rural development, *The Journal of Peasant Studies*, 36:1, 171-196, DOI: 10.1080/03066150902820503.
- IZI. (2020, Januari 06). *Salurkan Bantuan, Tim IZI Sambangi Wilayah Terparah Terdampak Banjir Bandang di Lebak Banten*. Diambil kembali dari izi: <https://izi.or.id/salurkan-bantuan-tim-izi-sambangi-wilayah-terparah-terdampak-banjir-bandang-di-lebak-banten>.
- Jabar, b. (2019, Agustus 29). *Baznas Jabar Inisiasi Kampung Tanggap Bencana*. Diambil kembali dari baznasjabar.org: <https://baznasjabar.org/news/baznas-jabar-inisiasi-kampung-tanggap-bencana>
- Maclean, M., Harvey, C. and Gordon, J. (2013), “Social innovation, Social entrepreneurship and the Practice of Contemporary Entrepreneurial Philanthropy, *International Small Business Journal*, Volume: 31 issue: 7, page(s): 747-763. Article first published online: April 29, 2012; Issue published: November 1, 2013.
- Marcus, A., & Asmorowati, S. (2006). Urban Poverty and the Rural Development Bias: Some Notes from Indonesia. *Journal of Developing Societies*, 22(2), 145– 168. <https://doi.org/10.1177/0169796X06065800>.
- Michelini, Juan Jose. (2013). “Small Farmers and Social Capital in Development Projects: Lessons From Failures in Argentina's Rural Periphery”, *Journal of Rural Studies*, Vol. 30, Pages: 99-109
- Nugroho, Yanuar (2010). “NGOs, the Internet and Sustainable Rural Development,” *Information, Communication & Society*, 13:1, 88- 120, DOI: 10.1080/13691180902992939.
- Rath, J. H. (2019). *Entrepreneurial Philanthropy Partnerships: In Search of Alignment: Essays on connecting the worlds of for-profit and non-profit*.
- Rath, Jos & Schuyt, Theo. (2014). “Entrepreneurial Philanthropy: An Exploratory Review, *The Journal of Wealth Management*, 17 (3) 35-46; DOI: <https://doi.org/10.3905/jwm.2014.17.3.035>.
- Ricky. (2018, November 2). *Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Banten Dukung Program Kampung Zakat di Lebak*. Diambil kembali dari izi.or.id: <https://izi.or.id/inisiatif-zakat-indonesia-perwakilan-banten-dukung-program-kampung-zakat-di-lebak/>
- Shackleton, Charlie M. Shackleton, Sheona E. & Cousins, Ben. (2001). “The role of landBased Strategies in Rural Livelihoods: The Contribution of Arable Production, Animal Husbandry and Natural Resource Harvesting in Communal Areas in South Africa, *Development Southern Africa*”, 18:5, 581-604, DOI: 10.1080/03768350120097441

Soleh, Achmad (2019), “Kampung Zakat, Program Memandirikan Desa,” <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-programmemandirikan-desa>

Yulita, R. A., Nurwahidin, & Huda, N. (2020). Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang). *Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7, No 1*, 33-45.

Wahyudin, H. A. (2019, Oktober 10). *Paragon Sinergi Bersama Rumah Zakat dalam Program Mobil Juara*. Diambil kembali dari Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/pt-paragon-sinergi-bersama-rumah-zakat-dalam-program-mobil-juara/>

Woolcock, M. J. (1999), “Learning from Failures in Microfinance”. *American Journal of Economics and Sociology*, 58: 17-42. DOI :10.1111/j.1536-7150.1999.tb03281.x
https://cfound.org/news_events/cff_news/philanthropreneurship_the_strategic_mindset_of_entrepreneurial_philanthropy

website

<https://republika.co.id/berita/p3ffpj415/forum-zakat-resmikan-kampung-zakat-di-lombok-barat>

<https://liputan.co.id/2019/12/anyaman-ketak-kampung-zakat-longserang-timur-tembus-jepang-dan-belanda/>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/3774-sinergi-rumah-kemasan-dan-baznas-perkuat-ekonomi-di-desa-langko-ntb>

<https://www.ngopibareng.id/timeline/bangkit-dari-gempa-bumi-warga-kampung-zakat-bikin-anyaman-ketak-3664074>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/2968-sinergi-baznas-dan-disperindag-kembangkan-kerajinan-ingke-untuk-mustahik-di-lombok-barat>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/3992-tingkatkan-penjualan-baznas-dorong-mustahik-binaan-perluas-pemasaran-produk-di-ntb>

<https://liputan.co.id/2019/12/sempat-terkena-gempa-ini-perkembangan-kampung-zakat-longserang-timur-ntb/>

<https://forumzakat.org/kompak-tiga-anggota-foz-ini-salurkan-bantuan-ke-kampung-zakat/>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/2412-baznas-salurkan-paket-logistik-keluarga-lewat-aksi-cash-for-work-di-kampung-zakat-langko>

<https://izi.or.id/rumah-jahit-izi-resmi-diadakan-di-kampung-zakat-sido-mulyo/>

<https://izi.or.id/kerja-sama-izi-pt-paragon-gulirkan-beasiswa-pelajar-sarana-air-bersih-di-desa-sido-mulyo-bengkulu/>

<https://izi.or.id/kerja-sama-izi-pt-paragon-gulirkan-beasiswa-pelajar-sarana-air-bersih-di-desa-sido-mulyo-bengkulu/>

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/05/09/p8gp0v380-baznas-gelar-program-kampung-zakat>

<https://banten.kemenag.go.id/peresmian-action-design-kampung-zakat-di-lebakgedong/>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/3888-baznas-lakukan-monitoring-evaluasi-pemberdayaan-kelompok-budidaya-belut-di-waeleman>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/3683-baznas-gerakkan-program-petani-sayur-untuk-mustahik-di-kampung-zakat-waeleman-maluku>

<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/2268-baznas-giatkan-mustahik-jaga-ketahanan-pangan-dengan-penanaman-sayuran>

18. LAMPIRAN-LAMPIRAN

ISLAMIC ‘PHILANTHROPRENEURSHIP’ AND RURAL DEVELOPMENT PROJECTS IN INDONESIA

During the World Zakat Forum Conference held in Jakarta in 2017 and the Halal Festival organized in Yogyakarta in 2018, a number of Islamic philanthropy organizations set up booths and galleries to expose their home industry and agricultural products. They exhibited agricultural products, such as parcels of coffee taken from some provinces of Indonesia, different flavors of cassava and potato snacks, canes of food products (meat, fish, traditional food, etc.). Likewise, home industry products such as batik fabric (traditional “wax-resist dyeing”), clothes, etc., made and produced by the communities were also displayed. Most of the products shown during the festivals are representing the outputs of rural development projects. On top of this, pictures of economic activities were also presented to notify the visitors about the shift in the concept of philanthropy programs and the transformation of charity practices into productive income-generating activities with the entrepreneurship soul. The booth keepers shared the ‘identical narratives’ with the visitors, emphasizing that zakat funds have been utilized and disbursed not only to relieve the suffering and to benefit the poor but also to develop the life quality of the communities among low-income households.

For many years voluntary organizations, including Muslim philanthropy associations, in Indonesia, have endeavored to translate philanthropy activism into economically strategic and innovative social projects in resolving social problems, empowering societies as well as in reducing poverty rates. The current trend in accelerating community development is entrepreneurship or social-entrepreneurship. The utilization of the entrepreneurship

perspective has increasingly become popular among Muslims, the largest population in Indonesia, through their organizations working in the communities. They realize that the large numbers of low-income households in Indonesia need something beyond charity and social services.

This paper explores the experiences of Indonesian Muslim philanthropy organizations in reframing the concept of philanthropy as well as in coping with economic disparities among Indonesian societies. In particular, this paper pays attention to the philanthropy and entrepreneurship projects in rural areas run by Muslim organizations. This paper asks: how Muslim philanthropy organizations handle rural development issues; and how ideas of entrepreneurship are incorporated into rural development projects within Muslim philanthropy organizations? What are the challenges faced by Muslim philanthropy organizations in coping with rural development projects?

From Social Services to ‘Phinthropreneurship’

In 2017, I met a local volunteer in Central Java who informed me that he envisioned a development scheme by assisting the farmers in his village. According to his observation, the farmers were confronted by difficulties in improving the values of their rice fields as well as in selling their paddy rice with a rationale price. Lack of knowledge, rare support from the local government, weakness of the social capital, powerful brokers, and less market networks are among the main problems that destruct farmers’ economic strength. The farmers achieved income less than they deserved. This local volunteer then came to an Islamic philanthropy organization. He never asked a subsidy for the villagers, nor did he requested direct fund. Instead, he proposed a long term project of the rural development sector in his village, especially among for the farmers. He negotiated with a Muslim philanthropy organization many times and convinced them that a suitable assistance to the farmers will not only make their life better, but also will help the farmers sustain their business. Finally, the Islamic philanthropy organization granted his proposal to assist the farmers for two years. His responsibility was to strengthen the social capital among the farmers, to link the farmers with the local government, as well as to prepare the business model, including to find the market place. The relationship between the local volunteer and philanthropy organizations, including the farmers, indicates the shift in character of the utilization of zakat fund for economically more productive activities.

Many questions have been raised by observers and NGO activists about the effectiveness of charitable works to increase the life quality of the communities. In 2008, Nic Frances and Mayrose Cuskelly published an interesting book entitled *The End of Charity: Time for Social Enterprises*. This book pays attention to such issues as social changes, welfare, inequality, and poverty, and how to energize the impact of social projects run by charitable organizations. The proposal of this book deals with the creation of the eco-system of social change, which is not merely charitable practices. The authors argue, “we need to move beyond notions of charity and welfare, beyond do-gooding and guilt, to a system that recognizes the complexity of our values and a realistic understanding of how we can support them” (Frances and Cuskelly 2008, 1). As charity activism is no longer sufficient to resolve the complex problem faced by the communities, the authors propose “social enterprises” as a way to escape from the poverty traps. Frances and Cuskelly also suggest: “A social entrepreneur is not merely someone innovative in terms of delivering a service while still relying for funding on philanthropic donations of government grant. A true social entrepreneur locates the interface between a social goal and building a consumer base for that service that delivers that goal” (Frances and Cuskelly 2008, 8).

Another term to denote a more creative and innovative work for social change formulate by observers and practitioners is called “social entrepreneurship.” This concept is

adopting the entrepreneurship values in the making of profit and transforming it into social changes. The basic idea of social entrepreneurship is to resolve social problems by not seeking profit either for the investors who have financed the projects or for themselves. Instead, the advocates of social entrepreneurship, as noted by Paul C. Light, seek “sustainable, large-scale change through pattern-breaking ideas in what government, non-profits, and business do to address significant social problems” (Light 2008, 12). By following the above meaning, Light also formulates social entrepreneurship as “efforts to solve intractable social problems through pattern-breaking change (Light 2008, 12).

Taking the above exposition of social enterprises or social entrepreneurship, I would like to bring further the idea of philanthropreneurship to analyze the current trend of philanthropy for a sustainable economy among Muslim communities. As notes by *Rajesh Chandy* (2014), “successful philanthropreneurs are those responsible for solutions that are impactful, scalable, and sustainable.” This means that the action of philanthropy can be projected to influence the nature of organization to give a more comprehensive and long-term impact on deserving beneficiaries. There are four elements of Philanthropreneurship: 1) endeavor to make a better life, 2) strengthened by the practice of giving both materially (money) or immaterially (time), 3) a creative approach to resolving the problems, and 4) influential leadership. Hence, philanthropreneurship resembles what Rath and Schuyt (2014) have termed “a market approach of philanthropy” as a part of the “entrepreneurial philanthropy.” The nature of philanthropreneurship is innovative social changes underpinned by vibrant voluntary actions, especially the donors, in sustaining long-term impact on beneficiaries and benefactors or organizations.

It should be noted that some Muslim philanthropic organizations have been modernized and strengthened by professional volunteers. Islamic Philanthropic organizations in Indonesia have made partnership with the private sector organizations have publicly appeared with more sophisticated social innovation projects in translating the philanthropic vision in the communities. Social innovation and entrepreneurial approach have been utilized to make people's life quality become well, not only among urban people living in densely populated areas but also in rural regions. Muslim philanthropic organizations entrusted funds by either the individual philanthropist or private sector organizations have attempted to resolve the problems by channeling the social funds for sustainable economy in rural areas.

Muslim Entrepreneurial Philanthropy and Rural Development

Rural development is not a new issue in the discourse of development sector in Indonesia. Like somewhere else, discussion of rural development is as old as discourse on Indonesian development as a whole. Soon after the Indonesian Independence, the Indonesian government accelerated development projects in the 1950s, especially in rural areas. Various schemes, ranging from establishing basic infrastructure such as bridge, road, and irrigation to populist projects such as *Padat Karya* and subsidy for villages, were provided by the government to energize village and agricultural activities (Birowo & Hansen 2018). Likewise, in the 1960s until now, when Indonesia has witness the rise of the NGO sector, civil society organizations and NGOs have paid much attention to rural areas and utilized different strategies, ranging from empowering local leaders, engaging women, providing new technology, as well as boosting internet technology (Beard 2005; Nugroho 2010).

It appears that recent rural development task is a continuum of the big narratives of Indonesian nation, which is reverberated by a wide-range of actors, including philanthropy organizations. In recent times, there have been efforts among Muslim philanthropic organizations to pay specific attention to rural development issues. In 2018, the Ministry of Religious Affairs, which in the Indonesian political context is responsible for managing Muslim philanthropy organizations, invited Muslim organizations for a meeting that

specifically discussed and elaborated the possible participation of philanthropy organizations to address rural problems. Based on the data taken from some sources, the Ministry of Religious Affairs urged each Muslim philanthropy organization to be responsible for some villages in Indonesia based on their organizational capacity. Some villages, both inside and outside Java Island, were identified as locations to be assisted. This a nationally exposed rural development project was termed “Kampung Zakat” (Zakat Village).

The objectives of the Zakat Village are to eradicate poverty, grow employment opportunities, as well as to increase productivity. There are five sectors in the village to be addressed by Muslim philanthropy organizations: economy, education, healthcare, social-humanity, and dakwah (Soleh 2019). The areas of operation of the Zakat Village are divided into three sectors: the Western part of Indonesia, the central, as well as the Eastern part. In many regions, severe poverty rates were mainly founded in rural areas. According to the National Statistic Board of the Republic of Indonesia (BPS), the Poverty rates in rural areas are much higher than urban areas, indicating that Indonesia is still facing complex and delicate economic inequality and social disparities, which than give impact on the quality of human resources development in rural areas. Concurrent with this, Indonesia is the second-highest average Gini Ratio in Asia after China.

Table 1
Percentage of People Living Under Poverty Rate in Urban and Rural Areas of Indonesia

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rural Poverty	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8	14.2	14.1
Urban Poverty	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2	8.3	7.7

Sources: National Statistic Board of Indonesia (BPS)

Due to the huge gap of Human Development Index between rural and urban areas, as well as unequal economic and development progress between some areas of Indonesia, as shown in the table above, in 2015 the government issued a Presidential Decree No. 131 on the Stipulation of Under-Developed Region Year 2015-2019, in which the government pay a serious attention to 122 Districts in Indonesia. In 2018, the Ministry of Religious Affairs launched the Kampung Zakat program. At the beginning, there were 17 villages located in various provinces as the targets. At the first batch, the government targeted seven districts: 1) Lebak (Banten); 2. Seluma (Bengkulu); 3. Belu (East Nusa Tenggara); 4. Lombok Timur (NTB); 5. Sambas (West Kalimantan); 6. Raja Ampat (West Papua); 7. Halmahera Timur (North Moluccas). In the second batch the Ministry of Religious Affairs pointed other seven districts: 1) Kota Bekasi (West Java); 2) Nabire (Papua); 3. Buru Island (Moluccas); 4) Indragiri Hilir (Riau), 5). Bulukumba (South Sulawesi); 6. Singkil (Aceh); and 7) Nunukan (North Kalimantan/Borneo). There are some criteria of the villages to be eligible to have assistances from philanthropy organizations: the village should be inhabited by no less than 100 families, the villages should have economic potentials, the villages were officially considered undeveloped, and their location are ‘easily’ reachable (Soleh 2019).

It should be noted that a rural development project under the framework of the Zakat Village is genuinely produced by the government via the Minister of Religious Affairs. Long before this initiative, Muslim philanthropic organizations and some other faith-based and secular NGOs conducted large development schemes in rural areas. Among the most important NGOs that have dedicated their energy to rural development are Bina Desa and P3M (*Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat*), whose contribution in the 1980s until 1990s was astonishing. At that time, some Indonesian NGOs received assistances and financial supports from foreign funding to run rural development projects. When Islamic philanthropy organizations, partly represented notably by zakat agencies, become

increasingly popular among Indonesians in the late 1990s and the political landscape also provided opportunity for Muslim philanthropy organizations to develop, rural development sector started flourishing. Different terms have so far utilized by Islamic philanthropy organizations to label their rural projects, such as *Desa Berdaya* (Empowered Villages), *Masyarakat Mandiri* (Self-Reliance Communities), etc. Muslim philanthropy organizations such as Rumah Zakat, BAZNAS, Dompot Dhuafa and Lazismu have shared similar narratives in addressing problems faced by the communities in rural areas.

As one of the largest Muslim philanthropy organizations in Indonesia, Rumah Zakat has a long social project run in both rural and urban areas, serving the communities and primarily low-income households with healthcare, education, and economic projects. Rumah Zakat has targeted 5000 empowered villages throughout Indonesia. It is reported that at the end of 2016 Rumah Zakat has accomplished its mission in 800 villages located in 129 districts. Zakat intervention in rural areas continues until now. The villagers are mostly labor farmers and always face uncertain employment. Rumah Zakat attempted to provide a wider opportunity for the villagers to have and manage their own business, including to become cow breeders, animal husbandry, coffee producer and some other activities to generate income. One of the primary efforts made by Rumah Zakat to support the villagers is the establishment of Community-Owned Business Unit (*BUMAS-Badan Usaha Milik Masyarakat*). The establishment of BUMAS took place, for example, in Mekarsari Village, located in Bandung District. To accelerate the rural development project, Rumah Zakat engages youths in the village as main actors, not only to handle the day to day activities but also to equip the projects with information technology (IT).

A similar project was carried out by Dompot Dhuafa under the label “Masyarakat Mandiri” (Self-Reliance Communities). Dompot Dhuafa is among the first Islamic Philanthropy organization which was managed professionally. Since its inception in the early 1990s, Dompot Dhuafa increasingly becomes a magnet for Muslim middle class residing in urban areas, especially in Jakarta. Gaining significant financial supports from the urban middle class who channeled their zakat and sadaqa, Dompot Dhuafa was able to expand its social projects in both urban and rural areas. The initial and essential stage taken by Dompot Dhuafa in empowering societies was the establishment of Micro-Credit Finance or Islamic Cooperative Loans (*Baitul Maal*). In 2005, Dompot Dhuafa entrusted authority to its autonomous division to run the projects. Ever since the *Masyarakat Mandiri* becomes a framework within which income-generating plans are organized. There are various projects run by Dompot Dhuafa as a part of parcel of its rural development projects. Aside from strengthening the community by stimulating micro economy through *Baitul Mal*, other projects such as farming, breeding, and home industries have been operated in some villages.

A similar way was also taken by BAZNAS, a state-sponsored zakat agency, to run village development under the framework of “Zakat Community Development” (ZCD), which means empowerment projects run based on the communities by integrating dakwah, economy, healthcare, and humanitarian. Zakat funds are instrumental in supporting financially all BAZNAS’ development-oriented activities. In this respect, BAZNAS has attempted to use an integrated approach to combining the objective of regional development, the national development goals, as well as sustainable development goals. In practice, BAZNAS uses three stages to run rural development scheme: First, *Salam Desa*, literally can be translated as “greeting to the village,” a step to set up a framework for communities to take action to grow. The volunteers conducted a small research to determine its baseline, program, plan, as well as to provide a precondition within the communities to run the initial projects. Second, *Bangkit Desa* (a stage to strengthen the villages). In this stage BAZNAS enhances the capacity of the local volunteers or facilitators, increasing the size of local institutions (health care, education, dakwah, and microeconomic institutions), as well as to solidify the

business unit management (production, financial management, and market access). Third, *Desa Berkah* (Blessing Village). This is the final stage of BAZNAS rural development program, where it is expected that villagers can finance their business, stabilize community, and promote their promising products.

Likewise, Muhammadiyah Zakat Board (LAZISMU) runs rural development projects by assisting farmers. In the Indonesian context, farmers with their limited scope of land are among the unfortunate groups whose income is quite low to compare with other professions. Muhammadiyah utilizes its widespread networks to run a project called *Tani Bangkit* (The Revived Farmers). One project that has been run was located in Gempol Village, sub-district Karanganyar, Klaten, Central Java, a district where paddy rice was produced significantly. The main problem often faced by the farmers is that the price of their paddy rice was bought by the brokers at such a low price, and thus, the farmers could only gain small revenue. In order to increase the revenue and shorten the delivery process from the farmers to the users, LAZISMU in partnership with other divisions of Muhammadiyah, such as Board of Economic Development (*Majelis Ekonomi*) and Board of Community Empowerment (*Majelis Pemberdayaan Masyarakat*) provided assistance, both technically and financially, to produce high quality paddy rice for the consumption of the upper-middle class. In Klaten, Groups of Farmers (*Gapoktan*), consisting of 80 people were trained to produce high-quality organic rice. In the first step, LAZISMU provided 50% of the budget so that the process of paddy rice production can be observed. After four months, LAZISMU established a partnership with Muhammadiyah universities in neighboring cities as buyers. The universities distributed the rice to their staff or employees. This process continues until now, and the farmers do not worry about the customers of their paddy rice. Because the business process was running well and managed quite successfully, from the stage of the training session, cultivation process, until product marketing, the farmers and the trainers do not need more financial intervention from zakat the LAZISMU. This means that the farmers can increase their income and they felt that their rice could securely be purchased directly by the third party (users) at a reasonable price. The sustainability of economic activities among the farmers or villagers is vastly depended upon the market place. Once their products can compete in the market place, they would have a chance to preserve their economic sources.

Sustainable Economy and the Local Volunteers

It appears that a new approach to organizing philanthropy, which is entrepreneurial philanthropy, has become increasingly recognized among Muslim philanthropic organizations in Indonesia. Some Muslim philanthropy organizations have been very concerned about the sustainable economy of the communities. They prioritize rural areas and selected some poor villages as the spots to run various types of activities to sustain communities' economies. It should be noted that not all projects can lead to successful outcomes, unless the projects are supported by reliable and well-organized local volunteers who devoted themselves to assisting the communities technically in preserving rural development projects constantly.

Different strategies have been used by Muslim philanthropy organizations to select local volunteers who are going to work for at least two or three years with the communities. Local volunteers in the Rumah Zakat's rural development projects are called "Inspirational Volunteer" (*Relawan Inspirasi/ RI*). The volunteers should have an experience in the community development program and eager to devote their times to be persistently involved in the two or three-year projects. Apart from this, the local volunteers are required to be knowledgeable in Islam and can also act as *ustadz* (Islamic teachers) who are able to assist the communities both practically and spiritually. One of the managers of Rumah Zakat explains: "Rumah Zakat expects that the Empowered Village projects can empower villagers

economically, but also spiritually” (Interview, July 2019). Therefore, the local volunteers do not represent philanthropy organization. Instead, they represent the communities. *Thus*, local volunteers act as Rumah Zakat’s partners in the communities.

Other philanthropy organizations, such as Baznas and Dompot Dhuafa, have a quite similar pattern with Rumah Zakat. Dompot Dhuafa uses a more inclusive process, openly inviting volunteers to joint their projects. The volunteers are divided into three categories: the first is common volunteers (*relawan umum*), which means volunteers whose working in their early carrier; the second is “volunteer specialists” (*relawan spesialis*), which means those volunteers with sufficient specialty and specific skills, and the third is “super volunteer” (*relawan super*), which consists of public figures such as artist or celebrities. Some of those volunteers, would be deployed to run not only humanitarian projects in disaster affected spots, but also development scheme in rural areas. Likewise, BAZNAS invited volunteers by sending a proposal, consisting a design to operate development projects while at the same time invites its network from various provinces. Meanwhile, the local volunteers involved in the Muhammadiyah’s rural development projects are mainly Muhammadiyah activists in the local level. Muhammadiyah is an Islamic civil society organization with more than 3000 branches, and some of branches operate in the villages. The local volunteers/activists engaging in Muhammadiyah rural projects are mainly the local leaders of the Muhammadiyah movement.

The social-enterprise projects that have been organized in rural areas by Muslim philanthropy organizations can be included into what I call ‘Islamic philanthropreneuship’ in this paper. There are four issues interesting to analyze. *First*, efforts to foster a better life in the communities. Muslim philanthropy organizations become increasingly realizing that rural development is a strategic issue. Muslim philanthropy organizations have utilized data provided by either the government, university-based research centers, or independence research division. Leaders and volunteers who are involving rural development schemes have explored the ideas of social disparities, unequal opportunities, social injustice, and income gap between the cities and the villages. Thanks to the supply of data from various sources, many Muslim philanthropy organizations have attempted to strengthen their efforts to change the life quality of society by choosing rural areas. My encounters and conversation with Muslim philanthropy leaders suggest that they have also mainstreamed specific points in the Sustainable Development Goals (SDGs) in their organizational policies. They have translated and interpreted some points of SDGs, such as zero hunger, clean water and sanitation, reduced inequalities, decent work and economic growth, as well as sustainable cities and communities. My conversation with some volunteers and staff working in Islamic philanthropy organizations suggest that they have claimed that SDGs become one of their reference in formulating development project, despite the fact that their views on SDGs are not yet well-documented in a comprehensive exposition.

Second, the giving practices remain essential in philanthropy and even the essential one. Muslim philanthropy organizations have played profound roles in stimulating and persuading donors, both individually and collectively, to participate in rural development plans. Private companies and even government own-companies have also contributed to supporting rural development projects, directly or indirectly. Flyers, brochures and advertising, which sharply mentioned rural problems and their possible solutions were exposed publicly by Muslim philanthropy organizations. The endeavors to publish rural issues publicly also lead to an increase in people’s awareness of what is going on in the villages and to what extent intervention from philanthropy organizations may resolve the problems.

Third, Muslim philanthropy organizations, with their limited financial, logical and practical capacities, have offered a ‘creative approach’ to the existing problems by

considering the capacity of local people. In the rural context, which is largely characterized by the agricultural culture, programs offered and created by Muslim philanthropy organizations, as mentioned previously, relate to the food security and livelihood, such as how to increase income, to grow the quality of farming system, to rise nutrition, etc. On top of that, to succeed the distribution of home industry products, assistances in improving the packaging and shipping systems, strengthening technology, as well as enlarging the market networks, have also been provided by philanthropy organizations. This means that livelihood perspective remains dominant approach to the rural development projects in Indonesia, like elsewhere in developing countries (See Ian Scoones 2009; Shackleton, et al., 2001).

Forth, leadership is also another issue that draws the attention of Muslim philanthropy organizations in running rural development projects. Leadership in this context means how to implant the leadership capacity of local leaders and volunteers in the sustainable development plans of rural areas. Some local volunteers were recruited to participate in capacity building activities, such as training and workshop how to manage small companies, organize local resources, utilize (simple) technology, as well as to maintain financial system in their business. It appears that soft skills, including commitment to the preservation of Islamic values become one of the objectives of Muslim philanthropy in their rural development projects. Muslim philanthropy organizations have addressed issues in sustaining economy in rural areas by strengthening “the formation of social capital” among villagers (Mondal 2000), because they also realize that the failure in sustainability economy among the poor can be caused by the lack of capacity and fragile social capital (Michelini 2013)

Concluding Remarks

Although market and entrepreneurship approaches have been constructive to foster sustainable economy in the communities, there are different stories that we can discover from the fields. Muslim philanthropy organizations were often faced with a wide-range of problems in their rural development tasks, especially to sustain economy of the villagers. Some philanthropic organizations have even witnessed failures in their projects, both in rural and urban areas. The faults in running rural development projects were caused by different factors, such as discrepancy in assisting the villages, lack of capacity of the local leaders, and fragile social capital among the villagers, as well as incompetent to challenge in the liberal market place. Inadequate intervention to rural problems are also among the most issues in the failure of rural development missions. In many cases, NGOs and philanthropy organizations do not know clearly or cannot identify evidently what people want, what people in rural areas can do, and how aid should be adequately delivered. In other words, “urban bias” is very often characterized rural development projects (Marcus & Asmorowati 2006).

Sustainable economy is the major issues promoted by Muslim philanthropy organizations. Sustainable economy becomes a common issues reverberated in their discourse. It should also be noted that sustainable economy can also become a factor to test the capacity of philanthropy organization in formulating the concept of ‘development’ that differs from charity. Whether their sustainable economy in rural areas can really endure and increase the incomes of the villagers, or these sustainable projects could discontinue in the near future become questions not only for the observers. Some volunteers claims that bigger challenges are facing their rural development projects, such as the giant market controlled by large business man. Ideas of philanthropreneurship that have increasingly characterized Muslims philanthropy practices, and have been implemented in some villages in rural regions in Indonesia, like in some other villages in developing countries, still need serious support from the local government and other sectors, notably the private market. In sum, Islamic philanthropreneurship may increase the villagers’ incomes. However, both volunteers and

villagers are also faced with some questions about the sustainability of their sustainable economy programs in rural areas in today's liberal market era.

Bibliography

- Bajde, Domen (2013), "Marketized philanthropy: Kiva's utopian ideology of entrepreneurial philanthropy", *Marketing Theory*, Volume: 13 issue: 1, pp 3-18.
- Best, M. L., & Kumar, R (2008). "Sustainability Failures of Rural Telecenters: Challenges from the Sustainable Access in Rural India (SARI) Project," *Information Technologies and Sustainable Development*, 4 (4): 31-45.
- Binswanger, Hans P. (1994). "Agricultural and Rural Development: Painful Lessons", *Agrekon*, 33:4, 165-174, DOI: [10.1080/03031853.1994.9524781](https://doi.org/10.1080/03031853.1994.9524781)
- Chandy, Rajesh (2014). "Welcome to the new age of philanthropy – philanthropreneurship," <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/dec/08/new-age-of-philanthropy-philanthropreneurship>.
- Harvey, Charles et al (2011), "Andrew Carnegie and the foundations of contemporary entrepreneurial philanthropy", *Business History*, 53:3, 425-450, DOI: [10.1080/00076791.2011.565516](https://doi.org/10.1080/00076791.2011.565516)
- Ian Scoones (2009) Livelihoods perspectives and rural development, *The Journal of Peasant Studies*, 36:1, 171-196, DOI: [10.1080/03066150902820503](https://doi.org/10.1080/03066150902820503)
- Maclean, M., Harvey, C. and Gordon, J. (2013), "Social innovation, Social entrepreneurship and the Practice of Contemporary Entrepreneurial Philanthropy, *International Small Business Journal*, Volume: 31 issue: 7, page(s): 747-763. Article first published online: April 29, 2012; Issue published: November 1, 2013.
- Marcus, A., & Asmorowati, S. (2006). Urban Poverty and the Rural Development Bias: Some Notes from Indonesia. *Journal of Developing Societies*, 22(2), 145–168. <https://doi.org/10.1177/0169796X06065800>
- Michellini, Juan Jose. (2013). "Small Farmers and Social Capital in Development Projects: Lessons From Failures in Argentina's Rural Periphery", *Journal of Rural Studies*, Vol. 30, Pages: 99-109
- Nugroho, Yanuar (2010). "NGOs, the Internet and Sustainable Rural Development," *Information, Communication & Society*, 13:1, 88-120, DOI: [10.1080/13691180902992939](https://doi.org/10.1080/13691180902992939)
- Rath, J. H. (2019). *Entrepreneurial Philanthropy Partnerships: In Search of Alignment: Essays on connecting the worlds of for-profit and non-profit*.
- Rath, Jos & Schuyt, Theo. (2014). "Entrepreneurial Philanthropy: An Exploratory Review, *The Journal of Wealth Management*, 17 (3) 35-46; DOI: <https://doi.org/10.3905/jwm.2014.17.3.035>
- Shackleton, Charlie M. Shackleton, Sheona E. & Cousins, Ben. (2001). "The role of land-Based Strategies in Rural Livelihoods: The Contribution of Arable Production, Animal Husbandry and Natural Resource Harvesting in Communal Areas in South Africa, *Development Southern Africa*", 18:5, 581-604, DOI: [10.1080/03768350120097441](https://doi.org/10.1080/03768350120097441)
- Soleh, Achmad (2019), "Kampung Zakat, Program Memandirikan Desa," <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa>
- Woolcock, M. J. (1999), "Learning from Failures in Microfinance". *American Journal of Economics and Sociology*, 58: 17-42. DOI :10.1111/j.1536-7150.1999.tb03281.x https://cffound.org/news_events/cff_news/philanthropreneurship_the_strategic_mindset_of_entrepreneurial_philanthropy

